



Perancangan Manajemen Bumdes dalam Meningkatkan Perekonomian Desa di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

Suryoto¹, Oti Kusumaningsih², Devit Bagus Indranika³, Anggara Setya Saputra⁴, Ranjani⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, Indonesia

Email : ¹suryoto@unwiku.ac.id, ²otikusumaningsihfisip@gmail.com, ³devitbagus@gmail.com,

⁴anggara@unwiku.ac.id, ⁵ranjani@unwiku.ac.id

Abstract

The existence of Law Number 6 of 2014 concerning Villages makes the village a strategic autonomous region. This can be a challenge for the village to take advantage of all the potential that exists, especially in improving the economy of the community. BUMDes is one of the efforts to improve the village economy. BUMDes is considered a business entity that supports the village economy if it is managed properly. But in reality, BUMDes in Indonesia are still far from expectations. The problem that often arises is in the management of BUMDes itself, especially in Beji Village, Kedungbanteng District, Banyumas Regency. The service method used is a focus group discussion (FGD) technique where the method uses qualitative data collection conducted by means of interviews guided by a moderator. The results shown are the response and support for every aspect, namely from the village government, community leaders and the general public. This is the first step and strategy in stimulating the community to achieve the goals of this service. The Beji Village BUMDes management design has begun to be initiated again with more professional and credible management so that the functions and roles of BUMDes can run according to the expectations of all parties. This is indicated by the re-recruitment of BUMDes managers in accordance with the standards. In addition, Beji Village BUMDes management has been systematized and structured, starting from the preparation of BUMDes planning, BUMDes management to BUMDes reporting and accountability forms.

Keywords: Business Manajemen, Bumdes, Village Economy.

Abstrak

Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat desa menjadi wilayah otonom yang strategis. Hal tersebut dapat menjadi tantangan bagi desa untuk memanfaatkan segala potensi yang ada terutama dalam peningkatan ekonomi masyarakatnya. BUMDes menjadi salah satu upaya dalam peningkatan perekonomian desa. BUMDes dianggap sebagai badan usaha penopang perekonomian desa apabila dikelola dengan baik. Tetapi pada kenyataannya BUMDes di Indonesia masih jauh dari harapan. Permasalahan yang seringkali muncul adalah pada manajemen BUMDes itu sendiri khususnya di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Metode pengabdian yang dilakukan menggunakan teknik *focus group discussion* (FGD) di mana metode tersebut menggunakan pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara wawancara dengan dipandu oleh seorang moderator. Hasil yang ditunjukkan adalah adanya tanggapan dan dukungan setiap aspek yaitu dari pemerintah desa, tokoh masyarakat maupun masyarakat umum. Hal tersebut menjadi Langkah awal dan strategi dalam menstimulus masyarakat demi tercapainya tujuan dari pengabdian ini. Perancangan manajemen BUMDes Desa Beji mulai dirintis kembali dengan kepengurusan yang lebih profesional dan kredibel agar fungsi dan peran BUMDes dapat berjalan sesuai harapan semua pihak. Hal tersebut ditunjukkan dengan perekrutan kembali pengelola BUMDes yang sesuai dengan standar Selain itu manajemen BUMDes Desa Beji sudah tersistem dan terstruktur mulai dari penyusunan perencanaan BUMDes, pengelolaan BUMDes sampai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban BUMDes.

Kata Kunci: Manajemen Bisnis, Bumdes, Perekonomian Desa.

A. PENDAHULUAN

Manajemen yang baik akan dapat menghasilkan organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Osborne dan Gaebler (1999) yang menyatakan bahwa penerapan paradigma new public manajemen untuk meningkatkan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas tercermin dalam manajemen bisnis pemerintah. Selain itu juga didukung Veblen (1999: 23) yang menyatakan bahwa manajemen bisnis pemerintah perlu dilakukan dengan penerapan prinsip bisnis yang mampu mempengaruhi pertumbuhan dan tujuan bisnis dimana dalam pengelolaannya dapat menanamkan pandangan dan kebiasaan berpikir sesuai alur bisnis. Hal tersebut menunjukkan bahwa perancangan manajemen dalam suatu organisasi menjadi penting dan harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Munculnya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa membuat desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri wilayahnya termasuk di dalamnya, desa dapat membuat badan usaha yang komersial yang dinamakan BUMDes yang menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum. Selain itu adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes semakin menegaskan keberadaan BUMDes yang memiliki tujuan dalam peningkatan pendapatan asli desa (PADes) dan perekonomian desa. BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Saat ini BUMDes di Indonesia masih menunjukkan belum terkelola secara optimal. Hal tersebut seperti diungkapkan Zuhri dan Sri (2020) yang menyatakan bahwa Sinjai Timur Kab. Sinjai menegaskan pengadaan BUMDes belum dilakukan secara ideal. Tidak banyak bukti kegunaannya dalam hal meningkatkan rasa aman masyarakat umum dari beberapa inisiatif baru-baru ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain komunikasi yang buruk antara BUMDes dengan masyarakat umum serta pemerintah desa setempat, serta buruknya transparansi, kapasitas manajerial, legal standing, dan stagnasi ekonomi akibat disiplin penduduk yang buruk. Sejalan dengan itu Salihin (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kinerja BUMDes di Desa Pejanggik di bawah standar, dan perekonomian masyarakat belum bisa banyak ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya sumber daya manusia. Hal lain juga

diungkapkan oleh Riyantidan dan Hendri (2021) yang menyatakan bahwa BUMDes Singajaya telah berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun pelaksanaannya belum dilakukan secara maksimal. Keterbatasan sumber daya manusia, landasan manajerial yang lemah, dan modal yang tidak mencukupi, semuanya menjadi penghambat operasional perusahaan. Agar pengelolaan BUMDes Singajaya dapat dilakukan secara efektif dan profesional, diperlukan peran pemerintah dalam mendidik, mendampingi, dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

BUMDes dapat digunakan sebagai alat dalam peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat desa khususnya di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Pada dasarnya BUMDes dapat dikategorikan menjadi empat kategori tingkatan yaitu BUMDes maju, berkembang, tumbuh dan dasar. Desa Beji memiliki BUMDes dengan nama BUMDes Mitra Sehati. Pada tahun 2021 tercatat bahwa BUMDes Desa Beji Mitra Sehati masih masuk dalam kategori BUMDes dasar (<http://tkpkd.bappeda.jatengprov.go.id/>). Hal tersebut membuat manajemen BUMDes di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas harus dapat dirancang dengan baik. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Senjani (2019) yang menyatakan bahwa manajemen BUMDes masih sederhana namun telah memiliki rencana untuk perbaikan ke depan. Peran BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa belum terlihat dikarenakan beberapa sistem manajemen yang belum memadai sehingga belum dapat diperhitungkan secara jelas besaran kontribusi BUMDes dalam PADes. Strategi yang ditawarkan adalah pengelolaan BUMDes dengan 5 (lima) sistem manajemen yang diperbaharui yaitu sistem manajemen keuangan, pemasaran, produksi, distribusi dan sumber daya manusia.

Pengelolaan BUMDes yang tidak optimal juga akan mengakibatkan peran BUMDes itu sendiri tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sinaga dan Sarida (2020) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa BUMDes Naga Dolok merupakan BUMDes yang pengelolaannya belum optimal. Hal ini mengakibatkan dampak BUMDes tidak dirasakan oleh masyarakat. Minimnya pembangunan BUMDes disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi yang tidak memadai, kurangnya pendekatan masyarakat, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. BUMDes Naga Dolok sebenarnya berpotensi untuk dikembangkan karena tidak ada pesaing, ada dukungan penyertaan modal dari pemerintah, SDA yang masih sangat bermanfaat. Sejalan dengan itu Wardana dkk (2022) menyatakan bahwa pengabdian masyarakat ini telah

meningkatkan keterampilan dan pemahaman pengelola BUMDes Retno Sembodo dan warga desa Baturetno dalam hal tata kelola manajemen organisasi, literasi digital, literasi keuangan, dan wawasan kewirausahaan. Dibangunnya model panduan pengelolaan BUMDes yang dapat dijadikan acuan dalam proses transformasi digital dan perluasan skala usaha unit usahanya merupakan makna dari hasil layanan ini. Hal tersebut menunjukkan peran aktif beberapa sektor sangat penting dilakukan terutama di kalangan akademisi.

Begitupun di desa beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, beberapa permasalahan yang muncul seperti sumber daya manusia yang tidak berkualitas, minimnya pemahaman tentang BUMDes, kurang mampu memanfaatkan potensi desa, dan pelaporan keuangan BUMDes yang tidak jelas. BUMdes di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas bahkan tidak bisa beroperasi, padahal sejak 2016 BUMDes ini sudah didirikan. Selain itu selama lima tahun terakhir pelaporan keuangan di BUMDes tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menjadi perhatian disemua sektor baik Pemerintah desa Beji maupun pengelola BUMDes Mitra Sehati untuk dapat merancang manajemen BUMDes yang baik, sehingga peran dan manfaat adanya BUMDes dapat dirasakan oleh semua pihak.

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Metode pengabdian yang digunakan adalah dengan metode focus group discussion (FGD) di mana metode FGD merupakan metode dengan pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara wawancara dengan dipandu oleh seorang moderator.

1. Waktu dan Tempat.

Waktu kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2022. Tempat lokasi dilaksanakannya pengabdian di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

2. Prosedur Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan focus group discussion (FGD) atau juga dapat disebut metode dan teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara melakukan wawancara kelompok. Dalam FGD, sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus masalah atau topik tertentu dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator. FGD merupakan metode dan teknik pengumpulan data atau informasi yang awalnya dikembangkan di dalam penelitian pemasaran, dalam perkembangannya kemudian pemakaian FGD dengan cepat meluas pemanfaatannya di dalam ilmu-ilmu sosial. Manfaat yang diperoleh dari FGD adalah bahwa dalam waktu relatif singkat

(cepat) dapat digali mengenai persepsi, pendapat, sikap, motivasi, pengetahuan, masalah dan harapan perubahan berkaitan dengan masalah tertentu. Pelaksanaan FGD secara umum dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan berikut ini:

a. Persiapan

Tim fasilitator memulai komunikasi secara informal dengan peserta yang berguna untuk menjalin kepercayaan dan pendekatan. Ruang yang memadai sangat menentukan kelancaran diskusi, maka diperlukan ruang yang nyaman.

b. Pembukaan

Fasilitator berfungsi sebagai pemandu diskusi yang memulai dengan melakukan pemanasan dan penjelasan tentang beberapa hal, seperti: sambutan, tujuan pertemuan, prosedur pertemuan dan perkenalan

c. Pelaksanaan

Selanjutnya proses diskusi diserahkan kepada seluruh peserta dengan hak suara yang sama. Peran fasilitator hanya mendampingi diskusi agar tidak keluar dari jalurnya. Dalam hal ini peran notulen sangat penting dalam merangkum jalannya diskusi.

d. Penutup

Fasilitator menyampaikan kesimpulan secara umum dari seluruh rangkaian diskusi. Berkenaan dengan hal itu apabila masih ada pertanyaan atau usulan tambahan, maka fasilitator perlu mendiskusikannya kembali dengan seluruh peserta tentang mekanisme pembahasannya selanjutnya, sehingga benar-benar diperoleh kesepakatan bersama.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa.

BUMDes merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kooperatif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, masyarakat ataupun hanya dimiliki individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat (Eko, 2013). Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran, disebutkan bahwa pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

a. Meningkatkan perekonomian desa

- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- i. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

BUM Desa memiliki peran untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian desa dan PADes. Dijelaskan juga bahwa BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa.

Bisnis yang bisa dilakukan oleh BUM Desa menurut Eko (dalam Kemendesa 2015) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Serving*

BUMDes menjalankan “bisnis sosial” yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, BUMDes ini memberikan social benefits kepada warga meskipun tidak memperoleh economic profit yang besar.

2. *Banking*

BUMDes menjalankan “bisnis uang”, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank- bank konvensional.

3. *Renting*

BUMDes menjalankan “bisnis penyewaan” untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.

4. *Brokering*

BUMDes menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha- usaha masyarakat.

5. *Trading*

BUMDes menjalankan bisnis berproduksi dan berdagang barang- barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada sekala pasar yang lebih luas.

6. *Holding*

BUMDes sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit- unit usaha yang ada di desa dimana masing- masing unit yang berdiri sendiri- sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUM Desa agar tumbuh usaha bersama.

Salah satu strategi dalam membuat stimulus kepada masyarakat, maupun pengelola BUMDes adalah dengan dukungan dari setiap aktor tersebut, sehingga jalannya diskusi, sosialisasi dan pendampingan pada pengelola dan masyarakat serta pemerintah Desa dapat sesuai harapan. Hal tersebut didukung hasil pengabdian masyarakat oleh Hatim dkk (2022) yang menyatakan bahwa hasil kegiatan pengabdian kubernas, kegiatan ini mendapat respon yang cukup baik dari pemerintah desa, Pengurus BUMDes hingga pemuda, sehingga para kelompok sasaran PKM meminta untuk di dampingi dalam kaitan dengan pengembangan usaha di desa Babawae. Pemerintah dan pengelola BUMDes Desa Beji tanggap dan merespon dengan baik berbagai saran dan rekomendasi yang diberikan oleh tim, khususnya berkaitan dengan perancangan manajemen BUMDes di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Diskusi dilakukan oleh beberapa pihak diantaranya adalah Badan Permusyawaratan Desa, RT/RW, Tokoh Masyarakat, dan dari pihak Pemerintah Desa. Berikut disajikan gambar pelaksanaan focus group discussion di Desa Beji.



Gambar 1. Pelaksanaan Focus Group Discussion di Desa Beji

Perancangan manajemen BUMDes Desa Beji dimulai dengan dirintisnya kembali susunan kepengurusan yang lebih profesional dan kredibel agar fungsi dan peran BUMDes dapat berjalan sesuai harapan semua pihak. Selain itu penyusunan jenis usaha BUMDes dan perencanaan program kegiatan dengan mengembangkan potensi Desa Beji. Perencanaan adalah pondasi yang harus dibangun BUMDes sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Melalui perencanaan, BUMDes

dapat menetapkan visi dan misi, tujuan, dan strategi yang akan digunakan. Sejalan dengan itu Kurtz dan Boone (2011) menyatakan bahwa perencanaan bisnis meliputi deskripsi tujuan perusahaan, strategi yang digunakan untuk mencapainya, dan tolok ukur yang digunakan untuk mengukurnya. Baliga dan Rodrigues (2015) menyatakan bahwa perencanaan bisnis sangat penting untuk mengenali hasil potensial, peluang tak terduga, dan hambatan potensial agar berhasil menavigasi lingkungan bisnis yang sangat kompetitif. Hal serupa juga diungkapkan oleh Suharyanto dan Hastowiyono (2014) yang menyatakan bahwa rencana bisnis atau *business plan* pada hakikatnya adalah gambaran tertulis tentang masa depan bisnis yang merinci apa, di mana, oleh siapa, dan bagaimana operasi bisnis akan dilakukan.

Menurut Tripathi dan Reddy (1991: 56) untuk membuat perencanaan yang efektif maka diperlukan faktor- faktor sebagai berikut:

1. *Coordination*, proses perencanaannya rumit, terdiri dari banyak rencana utama dan turunan. Penting agar semua rencana ini sesuai, tidak hanya dalam hal konten dan tindakan tetapi juga dalam hal waktu. Demikian pula, perencanaan jarak pendek dan jangka panjang harus sesuai.

2. *Communication*, perencanaan terbaik terjadi ketika setiap manajer di organisasi memiliki akses terhadap informasi yang lengkap, tidak hanya berkaitan dengan perencanaan wilayahnya sendiri tetapi juga ke area lain.

3. *Participation*, partisipasi bawahan dengan atasan juga merupakan elemen kunci dalam membuat perencanaan yang efektif. Ini meningkatkan pemahaman akan tujuan dan loyalitas bawahan dan membuat eksekusi rencana menjadi mudah

4. *Proper Climate*, Iklim yang tepat, sangat penting bahwa manajer puncak menetapkan iklim yang tepat untuk perencanaan. Ini melibatkan minat perencanaan di antara rangking dan arsip manajer dengan menetapkan tujuan mereka.

Supriyanto (2009) menjelaskan bahwa sebuah rencana bisnis harus memiliki unsur-unsur diantaranya adalah ringkasan, statement misi, faktor-faktor kunci, analisis pasar, produksi, manajemen dan analisis finansial. Keuntungan Menyusun rencana bisnis adalah mengarahkan arah operasi perusahaan; menjamin kelangsungan usaha; mengasah kemampuan manajerial Anda di dunia komersial; sebagai model bagaimana para pemimpin perusahaan harus melakukan operasi mereka; mengakui bahwa tidak akan terjadi apa-apa di perusahaan; sebagai alat komunikasi komersial; sebagai metode untuk mengurangi risiko komersial; memperluas peluang bisnis; membantu

memperoleh dukungan kredit modal bank; panduan pengawasan

Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa adanya ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial dengan membentuk struktur organisasi di dalam BUMDes. Hal ini diperlukan agar setiap karyawan BUMDes menyadari peran dan tanggung jawab mereka dan sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Hasibuan (2007) yang menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu upaya pengelolaan yang meliputi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Bentuk dari pengorganisasian BUMDes Desa beji adalah dengan Menyusun struktur organisasi dan pengisian personil sumber daya manusia yang mumpuni serta pemetaan tugas pokok fungsi masing-masing jabatan. Tidak hanya sumber daya manusia tetapi sumber daya finansial juga penting untuk menjalankan sebuah BUMDes. Hal tersebut seperti dinyatakan oleh Boone dan Kurtz (2011) bahwa perusahaan perlu terus memperoleh, mempertahankan, dan menumbuhkan modalnya, dan membutuhkan uang untuk berhasil. Hal serupa juga diungkapkan oleh Sukasmanto (2014) yang menyatakan bahwa usaha komersial pemerintah desa akan berhasil jika dapat bekerjasama secara finansial dengan beberapa mitra.

Setelah adanya penyusunan perencanaan yang sudah dibuat fungsi pengawasan akan sangat penting. Hal tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan BUMDes dapat berjalan sesuai prosedur, visi, misi dan tujuan BUMDes yang ditetapkan. Sehingga fungsi pengawasan di sini adalah bersifat berkelanjutan.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes adalah dalam bentuk laporan tertulis berupa laporan keuangan tahunan. Sejalan dengan itu Kurtz dan Boone (2011) menjelaskan bahwa pelaporan harus dikembangkan bersama dengan sistem pemantauan dan audit untuk menginformasikan organisasi dari semua tindakan dan pelaporan diri dengan menginformasikan instansi pemerintah yang tepat jika terjadi kesalahan.

Pertanggungjawaban tersebut dapat menciptakan suatu transparansi dalam BUMDes. Seperti halnya diungkapkan oleh Fung (2014) yang mengungkapkan bahwa organisasi dapat mencapai transparansi dengan menggunakan praktik akuntansi yang akurat, mengungkapkan informasi perusahaan dengan segera dan transparan, mengungkapkan konflik kepentingan yang melibatkan pemegang saham atau direktur, dan tindakan lainnya. Menciptakan budaya transparansi adalah langkah awal yang penting untuk mendapatkan kepercayaan, menurut Fung (2014). Sejalan dengan Rosidin dan

Fajriani (2013) menyatakan bahwa Prinsip transparansi berhubungan dengan menumbuhkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan informasi dan memastikan bahwa mudah untuk mengakses informasi yang benar dan memadai. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi perlu dilakukan.

D. PENUTUP

Setelah pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, pengelola BUMDes Desa Beji dengan didukung Pemerintah Desa Beji dapat merancang manajemen BUMDes Desa Beji yang lebih terukur terutama mengenai manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan BUMDes. Selain itu sinergitas antara pemerintah Desa dan masyarakat ikut berperan dalam pengawasan pengelolaan BUMDes. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah peran pemerintah desa dalam sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk merumuskan kembali jenis usaha dan tujuannya. Pemilihan personil pengelola BUMDes harus didasarkan pada profesionalitas, sehingga terciptanya sumber daya manusia BUMDes yang baik.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Purwokerto yang telah memberi dukungan finansial terhadap pengabdian ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Baliga, Ashwin J. dan Lewlyn L. R. Rodrigues. 2015. "Business Plan-The Secret to Success". *The International Journal of Business and Manajemen*. Vol 3, Issue 4, Pp 210-2014.
- Fung, Benjamin. 2014. "The Demand and Need for Transparency and Disclosure in Corporate Governance". *Universal Journal of Manajemen*. Volume 2, No.2 ,Pp 72-80.
- Hasibuan, Malayu S.P 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT Aksara: Bandung.
- Hastowiyono dan Suharyanto. 2014. *Penyusunan Kelayakan Usaha dan Pengembangan Usaha BUM Desa*. Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Hatim., Salha, M., Musdar, M. 2022. Identifikasi Potensi Ekonomi Mendukung Pengembangan BUMDes Desa Bobawae Kecamatan Makian Barat Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11-17.

<http://tkpkd.bappeda.jatengprov.go.id>. Diakses pada 27 Oktober 2022 Pukul 22:00 WIB.

Kemendesa. 2015. *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kurtz, David L. dan Louise E. Boone. 2011. *Contemporary Business 14th Edition*. United States Of America: John Wiley & Sons, Inc.

Osborne, David dan Ted Gaebler. 1999. *Mewirauahakan Birokrasi Mentransformasi Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik*. Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo.

Riyantidan, I, N., Hendri, H, A. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Singajaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Jurnal al-Idārah*, 80-93.

Rosidin, Abidarin dan Anggraeni Fajriani. 2003. *Reinventing Governance Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Salihin, A. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 1.

Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen pada BUMDes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 23-40.

Sinaga, K., Sarida, S. 2020. Effective BUMDes Manajemen Strategies to Improve Village Economy in Naga Dolok Village, Simalungun Regency. *Jurnal Mantik*, 2218-2224.

Sukasmanto. 2014. *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa*. Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

Supriyanto. 2009. "Business Plan Sebagai Langkah Awal Memulai Usaha." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Volume 6, Nomor 1, Pp 73-83.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Veblen, Thorstein. 1999. "The Theory of Business Enterprise". New York, C. Scribner's Sons, Pp 1-23.

Wardana., Hafizh, F., Suhartanto. (2022). Scale Up Business dan Digitalisasi Tata Kelola

BUMDes Retno Sembodo dalam Membentuk Kemandirian Ekonomi Masyarakat. Jurnal Pengabdian UNDIKMA: Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat, 178-189.